

ANALISIS ETIKA DAN MORALITAS TERHADAP KASUS GUS-GUS DI PULAU JAWA: PERSPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA DALAM KONTEKS KONTROVERSI

Balqis¹, Farah Ubaiyah², Riska Safitri³, Syaroful Muabbad⁴, Fakhrurrozi⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia

Email: ibnatusolihin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kontroversi yang melibatkan sejumlah tokoh berstatus "gus" di Pulau Jawa yang memunculkan ketegangan antara idealitas etika-moral dalam tradisi pesantren dan realitas perilaku tokoh agama di ruang publik digital. Dalam konteks modern, otoritas keagamaan tidak lagi diterima secara otomatis berdasarkan garis keturunan atau posisi sosial, melainkan dinilai melalui konsistensi etika, akhlak publik, dan sensitivitas moral dalam interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana kontroversi "gus" terbentuk, bagaimana moralitas tokoh agama direpresentasikan, serta bagaimana masyarakat merespon dinamika tersebut dalam perspektif etika normatif, moralitas sosial, dan konstruksi digital. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, data dikumpulkan melalui buku, jurnal, serta pemberitaan dan konten digital yang relevan. Analisis dilakukan dengan *content analysis* dan *critical discourse analysis* untuk membandingkan idealitas etika keagamaan dengan perilaku empiris para gus yang memicu perdebatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital menciptakan rezim moral baru yang menuntut transparansi, kehati-hatian berbahasa, dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi bagi tokoh agama. Kontroversi yang melibatkan Gus Elham, Gus Samsudin, dan Gus Miftah mengindikasikan rapuhnya legitimasi religius ketika perilaku tidak sejalan dengan nilai akhlak. Penelitian ini menegaskan perlunya revitalisasi etika publik tokoh agama serta penguatan pendidikan moral di pesantren agar otoritas keagamaan tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Etika, Moralitas, Sosial, Agama.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing controversy surrounding a number of figures with the status of "gus" (religious leaders) in Java, which has given rise to tensions between the ethical-moral ideals of Islamic boarding schools (pesantren) and the reality of religious figures' behavior in the digital public sphere. In the modern context, religious authority is no longer automatically accepted based on lineage or social position, but rather is assessed through ethical consistency, public morality, and moral sensitivity in social interactions. This research aims to comprehensively analyze how the "gus" controversy was formed, how the morality of religious figures is represented, and how society responds to these dynamics from the perspectives of normative ethics, social morality, and digital construction. Using library research methods, data was collected through books, journals, relevant news and digital content. The analysis was conducted

using content analysis and critical discourse analysis to compare the ideals of religious ethics with the empirical behavior of gus that sparked public debate. The results show that digital media creates a new moral regime that demands greater transparency, careful language, and public accountability for religious figures. The controversies involving Gus Elham, Gus Samsudin, and Gus Miftah indicate the fragility of religious legitimacy when behavior deviates from moral values. This research emphasizes the need to revitalize the public ethics of religious figures and strengthen moral education in Islamic boarding schools (pesantren) to ensure religious authority remains relevant and trusted by the public.

Keywords: Ethics, Morality, Social, Religion.

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika sosial-keagamaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa isu etika dan moralitas semakin mendapat perhatian luas seiring meningkatnya kompleksitas interaksi masyarakat modern. Dalam kajian etika, teori normatif seperti deontologi, teleologi, dan *virtue ethics* digunakan untuk memahami perilaku individu maupun kelompok (Hazan et al., 2025), sedangkan dalam kajian moralitas, teori konstruksionisme sosial melihat bagaimana norma dibentuk melalui proses sosial dan budaya (Hatmini & Nugroho, 2025). Secara umum, teori-teori tersebut berfungsi sebagai landasan untuk menilai benar atau salah suatu tindakan berdasarkan nilai yang berlaku. Dalam konteks masyarakat Jawa yang sarat tradisi keagamaan, nilai etika Islam dan norma sosial lokal juga menjadi rujukan penting. Namun, realitas empiris memperlihatkan bahwa tidak semua perilaku yang muncul di masyarakat, terutama yang melibatkan figur publik religius seperti para "gus", sejalan dengan teori etika dan moralitas yang dianut secara ideal (Turyani et al., 2024).

Fenomena kasus-kasus yang melibatkan para "gus", yakni sebutan bagi keturunan kiai atau pemuka pesantren di Pulau Jawa, menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas moral dan konsistensi etika keagamaan. Banyak teori tentang moral leadership menekankan bahwa posisi seseorang sebagai tokoh agama mestinya diimbangi tanggung jawab moral yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *moral exemplar*. Namun, di tingkat empiris muncul berbagai kontroversi yang menyangkut perilaku tidak etis, misinformasi, penyalahgunaan otoritas, hingga ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Realitas ini menegaskan perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana figur yang seharusnya menjadi sumber keteladanan justru terlibat dalam tindakan yang memicu perdebatan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori etika dan praktik nyata yang terjadi di masyarakat (Fitriani, 2021).

Dalam lima tahun terakhir terdapat sejumlah penelitian di jurnal terindeks SINTA yang relevan dengan studi tentang figur "gus", pesantren, otoritas keagamaan dan dinamika moral-sosial, meskipun belum secara spesifik membahas "kasus kontroversi gus-gus di Jawa". Pertama, penelitian *Routinizing Charisma: The Rise of Gus and The Transformation of Pesantren in Jepara, Indonesia* (2025) menunjukkan bagaimana proses transmisi kepemimpinan dari "kiai" ke "gus" tidak sekadar regenerasi kelembagaan, tetapi juga mendorong transformasi sosial-religius dalam lembaga pesantren agar mampu beradaptasi dengan tantangan global (Amaliyah, 2025). Kedua, artikel *Dampak Gelar Keagamaan terhadap Otoritas Sosial: Studi Kritis terhadap Gus Miftah di Media Sosial TikTok dalam Perspektif Budaya dan Agama* (2025) mengkaji bagaimana gelar "Gus" menjadi simbol legitimasi keagamaan dan social capital di era digital, serta bagaimana otoritas tersebut dinegosiasikan ulang di ruang media sosial (Taufiqurrahman et al.,

2025). Ketiga, penelitian dalam jurnal dakwah, *Religious Authority in the New Media Era: Sabilul Huda Islamic Boarding School Da'wah on Social Media* (2023), memaparkan bagaimana pesantren dan aktor keagamaan menggunakan media sosial untuk dakwah sehingga bentuk otoritas tradisional dipertaruhkan oleh logika digital dan persepsi publik (Kuswana & Pauzian, 2023). Keempat, studi kasus *Analisis Dampak Dakwah Gus Iqdam terhadap Dinamika Sosial dan Keagamaan: Studi Kasus pada Masyarakat Karanggayam Blitar* (2025) mencermati dampak sosial dan keagamaan dari aktivitas dakwah seorang "gus" terhadap komunitas lokal, hal ini membuka perspektif empiris bagaimana peran "gus" dapat mempengaruhi struktur sosial, moral, dan religius di masyarakat (Mufrida & Pratiwi, 2025). Kelima, penelitian di bidang pendidikan pesantren dalam artikel *Upaya Melestarikan Tradisi Keagamaan Aswaja (Studi Kasus Pondok Pesantren al-Falah Sumber Gayam Pamekasan)* (2024) menunjukkan bagaimana pesantren secara institusional mencoba mempertahankan tradisi Aswaja di tengah arus perubahan sosial dan modernisasi relevan untuk memahami latar belakang normatif dan nilai dalam komunitas pesantren (Laili & Fauzi, 2024).

Meski sudah ada studi-studi tersebut, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) yang cukup jelas: tidak ada penelitian 2023-2025 yang secara spesifik mengkaji kontroversi yang menyeret figur "gus-gus" di Pulau Jawa, ditinjau dari perspektif etika, moralitas, dan persepsi sosial keagamaan, terutama memerhatikan bagaimana gelar "gus" dipertaruhkan, bagaimana media sosial mempengaruhi legitimasi moral, dan bagaimana masyarakat merespon ketika norma moral dan religius dianggap dilanggar. Penelitian-penelitian di atas umumnya fokus pada: kepemimpinan dan transformasi kelembagaan pesantren, dakwah dan otoritas di media sosial, atau moderasi/tradisi pesantren, tetapi belum ada yang mensintesis ketiga dimensi itu sebagai sebuah fenomena "kontroversi gus-gus". *Novelty* penelitian adalah bahwa akan mengisi celah tersebut dengan pendekatan integratif: menganalisis kasus "gus-gus" sebagai persimpangan antara etika keagamaan (normatif), moral sosial (komunitas & publik), dan dinamika media publik/digital. Dengan demikian penelitian ini diharapkan menghasilkan model analitis baru tentang bagaimana otoritas keagamaan tradisional (gus) diuji dalam konteks modern baik dari aspek nilai, legitimasi sosial, maupun komunikasi publik, sebuah kontribusi teoritis dan empiris yang belum tersedia di literatur saat ini.

Kesenjangan antara teori etika yang digagas para filosof maupun ulama klasik dengan kenyataan perilaku sebagian gus menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam internalisasi nilai moral. Secara teoritis, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren dipandang memiliki modal moral yang kuat, mengingat tradisi pendidikan pesantren menekankan santri pada ajaran akhlak, adab, dan integritas (Riawan, 2023). Namun dalam praktik, beberapa kasus kontroversi memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh organisasi keagamaan, pesantren, maupun komunitas sosial melalui edukasi, klarifikasi publik, dan pengawasan perilaku tokoh agama. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa respons tersebut sering kali bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah terkait konstruksi moral modern yang dipengaruhi oleh media, popularitas, dan tekanan publik.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat posisi strategis para gus sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini masyarakat, terutama dalam isu agama dan sosial. Dari sudut pandang keilmuan, penelitian ini dapat

memperkaya literatur etika publik, moralitas keagamaan, dan studi sosial tentang elite religius. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemetaan masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian etika dan moralitas tokoh agama, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penguatan karakter di pesantren. Jika fenomena ini dibiarkan tanpa kajian akademis, akan muncul risiko degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren serta melemahnya otoritas moral tokoh agama yang selama ini menjadi pilar sosial.

Dari sudut pandang empiris, berbagai reaksi masyarakat terhadap kontroversi gus-gus menunjukkan adanya kegelisahan kolektif terhadap perubahan wajah otoritas keagamaan. Media sosial menjadi ruang utama di mana diskursus mengenai perilaku tidak etis tokoh agama menyebar dengan cepat, memicu polarisasi dan penilaian moral yang beragam (Ardona & Nasar, 2025). Tanpa kajian ilmiah yang objektif, interpretasi masyarakat cenderung dipengaruhi oleh emosi dan bias kelompok. Kondisi ini mempertegas pentingnya penelitian yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar persoalan, pola perilaku, serta dampak sosial kontroversi tersebut. Kajian ini juga akan membantu menilai apakah persoalan ini bersifat individual, struktural, atau akibat perubahan sosial yang lebih luas di masyarakat pesantren.

Dengan demikian, penelitian ini mendudukkan isu etika dan moralitas para gus bukan hanya sebagai fenomena insidental, tetapi sebagai bagian dari perubahan sosial yang tengah berlangsung. Analisis mendalam mengenai nilai moral, struktur sosial agama, serta respon masyarakat akan membuka pemahaman baru mengenai bagaimana otoritas keagamaan dipertahankan atau mengalami krisis. Apabila persoalan ini diabaikan, dikhawatirkan terjadi erosi nilai-nilai moral masyarakat serta menurunnya kualitas kepemimpinan religius. Sebaliknya, jika penelitian ini dilakukan, manfaat besar akan diperoleh berupa rekomendasi ilmiah yang mampu menjadi pijakan dalam penguatan akhlak, perbaikan sistem pendidikan pesantren, dan pembinaan etika publik bagi tokoh agama. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode yang memusatkan kajian pada sumber-sumber tertulis sebagai basis analisis ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konseptual, teoritis, dan interpretatif mengenai isu etika dan moralitas tokoh agama dalam hal ini para *gus* di Pulau Jawa beserta dinamika sosial dan religius yang menyertai kontroversi tersebut. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri teori etika normatif (seperti deontologi, teleologi, dan *virtue ethics*), teori moralitas sosial, konsep kepemimpinan religius, serta literatur tentang otoritas pesantren sebagai kerangka analisis utama (Hamzah, 2022).

Data utama penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal terindeks SINTA, laporan penelitian, dokumen keagamaan, fatwa, pendapat ulama, serta analisis media (artikel berita, opini, dan dokumentasi digital) yang relevan dengan fenomena kontroversi gus-gus. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan etika, moralitas, dan dinamika sosial-keagamaan di lingkungan pesantren; (2) seleksi sumber berdasarkan kredibilitas akademik dan relevansi konteks; (3) kategorisasi data ke dalam tema-tema seperti etika tokoh agama, otoritas moral, perilaku menyimpang, respon masyarakat,

serta konstruksi kontroversi di media sosial; dan (4) verifikasi silang terhadap berbagai sumber untuk menghindari bias interpretasi.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis (*critical discourse analysis*). Analisis isi digunakan untuk menafsirkan pesan, konsep, dan nilai moral yang muncul dalam teks, sementara analisis wacana kritis digunakan untuk menelusuri bagaimana narasi mengenai para gus dikonstruksi, diperdebatkan, dan diberi makna dalam ruang sosial-agama maupun ruang digital. Metode ini membantu membedakan antara norma etika ideal menurut teori, norma moralitas menurut ajaran agama, dan perilaku empiris yang memicu kontroversi publik.

Temuan kemudian dibahas melalui pendekatan komparatif, yaitu membandingkan antara idealitas etika sebagaimana dijelaskan dalam literatur etis dan keagamaan dengan realitas perilaku gus yang direpresentasikan dalam berbagai sumber. Pendekatan ini sekaligus mengidentifikasi pola penyimpangan, akar persoalan, serta faktor sosial-budaya yang memengaruhi munculnya kontroversi. Dengan demikian, pendekatan *library research* memberi ruang bagi analisis yang mendalam, argumentatif, dan terukur, serta menghasilkan simpulan teoretis yang relevan tanpa harus menggunakan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Etika dan Moralitas Tokoh Gus-gus dalam Literatur, Media, dan Perspektif Keagamaan

Dalam literatur mengenai kepemimpinan religius dan fungsi tokoh agama di masyarakat modern, sejumlah penelitian menekankan bahwa pemuka agama termasuk yang memiliki status “gus” memegang peran penting sebagai ankar moral (*moral anchor*) bagi komunitas Muslim. Sebagai contoh, dalam artikel “*Strategic Roles of Religious Leaders in Shaping Islamic Youth Morality*” ditemukan bahwa para pemimpin agama berperan fundamental melalui strategi dakwah adaptif di era digital, mentoring intensif, dan revitalisasi rumah ibadah, yang secara signifikan mempengaruhi pembentukan moral generasi muda. Pendekatan ini menggambarkan ekspektasi normatif terhadap figur religius: bukan hanya sebagai guru agama, tetapi sebagai penegak akhlak dan moralitas publik (Siregar & Madya, 2025).

Secara tradisional, dalam konteks pesantren dan komunitas keagamaan di Jawa, status “gus” membawa modal sosial dan simbolik pewarisan legitimasi keagamaan dari kiai, serta kepercayaan masyarakat. Literatur klasik maupun modern menyatakan konsep bahwa tokoh agama seharusnya mampu menginternalisasi nilai-nilai akhlak: jujur, amanah, tawadhu, menjaga adab dalam interaksi, dan menghindari perilaku negatif. Nilai-nilai ini, menurut teori etika keagamaan, bukan sekadar formalitas, melainkan landasan moral kehidupan beragama dan sosial (Sartono et al., 2025).

Namun, ketika kita meninjau kasus-kasus kontemporer yang melibatkan tokoh gus, representasi ideal ini sering diuji secara tajam dan kadang terbantahkan. Kasus Gus Elham, misalnya, yang videonya viral karena mencium anak perempuan di atas panggung pengajian, memicu kecaman luas dari masyarakat, tokoh agama, dan pejabat negara. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa tindakan tersebut “tidak pantas” walau pelaku memiliki status agama menandakan bahwa posisi sebagai pemuka agama tidak bisa dijadikan pemberaran otomatis atas tindakan yang

melanggar moral atau norma sosial. Respons publik terhadap kasus seperti Gus Elham menunjukkan bahwa moralitas tokoh agama kini tidak lagi hanya diukur dari latar belakang keturunan atau gelar pesantren, melainkan dari konsistensi perilaku dan komitmen etis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tindakan seorang gus menyimpang dari norma akhlak yang diharapkan, legitimasi moralnya mudah terkikis dan masyarakat cenderung menuntut pertanggungjawaban. Kasus ini seolah menjadi titik balik: definisi “gus” sebagai pemimpin moral harus diterjemahkan kembali dalam konteks modern, dengan transparansi dan akuntabilitas (Fakhruddin, 2025).

Kemudian, dalam kasus lain, Gus Samsudin juga mendapat tuntutan hukum terkait konten viral pertukaran pasangan dalam dakwahnya suatu bentuk penyimpangan etika yang langsung berhadapan dengan norma sosial dan agama. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa status keagamaan tidak membebaskan seseorang dari evaluasi moral bahkan bisa lebih rentan kritikan, karena masyarakat menaruh harapan besar pada figur agama (Purwanti, 2024).

Dari sudut pandang teori moral sosial, fenomena ini menunjukkan bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang statis atau diwariskan otomatis melalui status sosial, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus dibentuk melalui interaksi, pengawasan publik, dan norma kontemporer. Masyarakat modern termasuk generasi milenial dan gen Z cenderung menggunakan kacamata moral kritis, menilai tokoh agama berdasarkan perilaku nyata, bukan label atau warisan. Hal ini menuntut figur religius untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan moral masyarakat yang berubah (Hesya, 2025).

Penggunaan media sosial dan ruang digital sebagai arena dakwah dan interaksi publik semakin memperluas ruang penilaian moral. Video/video pendek, potongan ceramah, atau dokumentasi kegiatan dakwah dengan cepat bisa menjadi viral sehingga reputasi seorang gus dapat dipersepsi ulang dalam hitungan jam. Dalam konteks ini, tindakan pribadi atau dakwah yang bermasalah tidak lagi bersifat elit atau privat, melainkan menjadi konsumsi publik luas. Hal ini memperkuat kebutuhan akan etika publik bahwa figur keagamaan dituntut menjaga konsistensi moral tidak hanya di ruang pesantren, tetapi di ruang digital dan sosial publik (Kasir & Awali, 2024).

Kasus Gus Elham misalnya memperlihatkan bahwa tindakan yang mungkin dianggap biasa dalam konteks tradisional seperti mencium anak sebagai wujud kasih sayang ketika dimasukkan ke ruang publik dan dinilai lewat norma modern, bisa dibaca sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak, adab, dan etika dakwah. Pemerintah dan masyarakat menuntut klarifikasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi terhadap bagaimana otoritas keagamaan dilihat di masyarakat modern (Fakhruddin, 2025).

Disamping itu, kasus yang melibatkan Gus Miftah juga menjadi salah satu contoh representasi dinamika moralitas dan etika tokoh agama di ruang publik. Dalam pemberitaan yang beredar luas, Gus Miftah menuai kritik setelah videonya menyebut seorang pedagang es sebagai “goblok”, sehingga memunculkan perdebatan tentang adab dan etika seorang publik figur religius. Kasus ini dilaporkan oleh berbagai media dan menjadi sorotan akademisi, termasuk dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mengingatkan bahwa seorang tokoh agama

memiliki tanggung jawab menjaga pilihan diki, etika berbahasa, dan sensitivitas sosial dalam dakwah (Sahal, 2024).

Secara etis, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah seorang ulama atau tokoh dakwah dapat menggunakan bahasa kasar dalam konteks ceramah atau interaksi publik? Dalam teori etika Islam, konsep *akhlaq al-karimah* menekankan prinsip berkata baik (*qaulan ma'rūfā*), lembut (*qaulan layyinah*), dan penuh hikmah (*bil-hikmah*) sebagai fondasi dakwah. Bahasa kasar menyalahi prinsip *dakwah bil-hikmah* yang dijelaskan oleh ulama klasik dan ditegaskan kembali dalam literatur modern tentang komunikasi dakwah. Secara khusus, teori *public figure ethics* menyatakan bahwa tokoh berpengaruh memiliki standar moral lebih tinggi karena ucapannya dapat membentuk persepsi sosial, meningkatkan stigma, atau menormalisasi perilaku verbal agresif di masyarakat (Rafidawati & Nurjanah, 2025).

Selain itu, fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang digital memengaruhi ekspektasi moral terhadap tokoh agama. Dalam ceramah konvensional di lingkungan pesantren, gaya komunikasi yang tegas atau humor kasar mungkin dianggap biasa. Namun ketika pernyataan tersebut tersebar di media sosial, konteks berubah total: audiens menjadi lebih luas, lebih heterogen, dan lebih sensitif terhadap isu martabat, kesetaraan, serta etika publik. Akibatnya, tindakan yang sebelumnya dianggap "lumrah" dapat dibaca sebagai pelanggaran moral dan ketidakpekaan sosial. Hal ini sejalan dengan teori *contextual moral judgment* yang menjelaskan bahwa standar moral masyarakat berubah sesuai konteks sosial dan teknologi (Effendi & Ridwan, 2022).

Kasus Gus Miftah juga memperlihatkan bahwa otoritas moral tokoh agama kini berada di bawah pengawasan publik yang ketat. Kepemimpinan religius digital menegaskan bahwa reputasi tokoh agama sangat dipengaruhi oleh cara mereka mengelola citra, bahasa, dan interaksi di media sosial (Enjang & Supandi, 2025). Reaksi terhadap kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat menuntut para gus dan kiai untuk mengedepankan etika publik, kesantunan verbal, dan teladan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai penelitian tentang etika dakwah modern, publik mengharapkan tokoh agama tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami dinamika komunikasi etis di ruang digital yang sangat sensitif terhadap ujaran merendahkan atau tidak etis (Lubis & Kadri, 2024).

Dalam literatur akademik tentang kepemimpinan berbasis agama dan legitimasi publik, studi terbaru menunjukkan bahwa ketika elite religius terlibat skandal baik moral, korupsi, maupun kriminal legitimasi moral dan keagamaan mereka mudah runtuh, dan kepercayaan publik bisa bergeser cepat. Sebagai contoh, penelitian *Religion-Based Leadership and Shifting Public Perceptions: The Case of Gus Muhdlor in Sidoarjo* menunjukkan bahwa figur yang sebelumnya dianggap inspiratif kehilangan dukungan ketika terlibat skandal korupsi, menandakan bahwa "modal simbolik religius" bisa rapuh jika tidak disertai akuntabilitas dan kinerja moral konkret (Governance et al., 2025).

Hasil kajian ini membawa implikasi penting bagi pemahaman etika dan moralitas tokoh agama dalam konteks kekinian: bahwa akhlak dan moralitas tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan media. Status sebagai "gus" atau keturunan kiai tetap relevan, tetapi tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang akan menjadi teladan moral. Kepemimpinan religius harus dibarengi dengan kesadaran akan tanggung jawab publik, transparansi dalam dakwah, dan sensitivitas terhadap nilai moral yang berkembang di masyarakat modern.

2. Analisis Sosial-Agama terhadap Dinamika Kontroversi Gus-gus di Pulau Jawa

Fenomena kontroversi yang melibatkan sejumlah tokoh berstatus "gus" di Pulau Jawa mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam relasi antara otoritas keagamaan dan masyarakat modern. Pada masa tradisional, legitimasi seorang gus diterima secara otomatis karena faktor genealogis, kedekatan dengan struktur pesantren, atau keturunan dari seorang kiai karismatik. Namun dalam era digital, legitimasi tersebut tidak lagi bersifat absolut. Publik menilai ulang otoritas moral tokoh agama berdasarkan perilaku, rekam jejak, dan konsistensi etika di ruang publik. Perubahan ini menandakan bahwa otoritas keagamaan kini bergeser ke arah model legitimasi performatif, yang dibangun oleh perilaku etis dan kemampuan menjaga moral publik (Yusutria, 2023).

Kasus Gus Elham menjadi contoh nyata bagaimana perilaku tokoh agama dapat dengan cepat menciptakan kegelisahan sosial. Dalam video yang beredar, Gus Elham terlihat mencium seorang anak perempuan di atas panggung pengajian. Kasus ini memicu reaksi kuat dari KemenPPPA, tokoh masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia yang menilai tindakan tersebut memiliki potensi mengarah pada *child grooming*. Respons ini menunjukkan bahwa masyarakat menuntut standar moral yang ketat pada ulama karena mereka menjadi rujukan etika. Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa norma keagamaan terkait adab interaksi dengan anak kini berada di bawah pengawasan publik yang lebih sensitif terhadap isu perlindungan anak (Fakhruddin, 2025).

Dalam perspektif sosial-agama, kasus Gus Elham memperlihatkan terjadinya benturan antara norma tradisional dan norma modern. Pada sebagian masyarakat, tindakan mencium anak dianggap wajar sebagai ekspresi kasih sayang. Namun dalam konteks publik dan terekam secara digital, tindakan tersebut direinterpretasi melalui norma hukum, etika publik, dan sensitivitas sosial kontemporer. Fenomena ini menggambarkan bagaimana ruang digital menciptakan regime moral baru, di mana sikap yang sebelumnya diterima secara lokal dapat dipandang bermasalah oleh audiens yang lebih luas (Fakhruddin, 2025).

Kasus Gus Samsudin, yang menghadapi tuntutan hukum karena membuat konten "tukar pasangan", menunjukkan dimensi lain dari pergeseran moralitas publik terhadap tokoh agama. Konten dakwah yang menggunakan skenario ekstrem atau dramatis untuk menarik perhatian penonton menimbulkan kritik serius karena dianggap melecehkan nilai agama dan mencederai adab dakwah. Kejadian ini menunjukkan adanya fenomena komodifikasi dakwah, yaitu ketika dakwah berubah menjadi konsumsi digital dan sensasi, sehingga berpotensi mengorbankan nilai etika demi popularitas. Kritik masyarakat terhadap Gus Samsudin menegaskan bahwa publik tidak lagi mengizinkan tokoh agama memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan sensasional (Purwanti, 2024).

Secara sosiologis, kasus-kasus semacam ini mencerminkan adanya transformasi pada pola dakwah tokoh agama. Dakwah tidak hanya dilakukan di masjid atau pesantren, tetapi juga di media sosial, YouTube, TikTok, dan platform daring lainnya. Perpindahan ruang dakwah ini menuntut kemampuan adaptasi sekaligus menghadirkan risiko baru: apa pun yang disampaikan seorang tokoh agama di ruang digital dapat menjadi kontroversi apabila tidak disertai etika komunikasi yang baik. Ketidakhati-hatian dalam memilih konten atau narasi dapat

menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi pesantren dan ulama secara keseluruhan (Rizky et al., 2025).

Kasus Gus Miftah, yang viral karena menyebut seorang pedagang es “goblok”, juga menambah daftar panjang problematika etika komunikasi publik yang melibatkan tokoh agama. Kritik akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap kasus ini menegaskan bahwa seorang publik figur religius seharusnya menjaga pilihan kata dan adab berbicara. Dalam perspektif etika keagamaan, ucapan kasar bertentangan dengan prinsip *qaulan karīma*, *qaulan layyinān*, dan *bil-hikmah* yang menjadi fondasi dakwah. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwah yang mengandung unsur verbal agresif tidak lagi diterima oleh publik modern yang menuntut keteladanan, kesantunan, dan empati dari tokoh agama (Sahal, 2024).

Ketiga kasus tersebut mengungkap pola yang sama: terjadi ketidakselarasan antara status religius dan perilaku publik. Publik yang semakin kritis tidak lagi menerima otoritas keagamaan berdasarkan nama atau garis keturunan. Sebaliknya, masyarakat menilai tokoh agama berdasarkan konsistensi moral dan kesesuaian perilaku dengan ajaran agama. Fenomena ini sejalan dengan teori “*moral accountability*”, yaitu konsep bahwa semakin tinggi status moral seseorang di masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan publik terhadapnya (Imbaruddin, 2016).

Selain itu, dinamika kontroversi gus-gus juga memperlihatkan bagaimana tatanan sosial-keagamaan Jawa mengalami reorientasi moral. Pesantren sebagai institusi tradisional dituntut untuk memperkuat pengawasan internal terhadap para pewaris tradisi keagamaan. Masyarakat pun semakin aktif dalam mengkritisi perilaku tokoh agama melalui media sosial. Situasi ini memperkuat argumen bahwa otoritas keagamaan kini berada dalam proses renegosiasi, di mana publik memiliki peran besar dalam memvalidasi atau mencabut legitimasi moral seorang tokoh agama (Renaldi, 2025).

Dilihat dari perspektif teori sosial agama, fenomena ini menunjukkan munculnya krisis kepercayaan parsial terhadap sebagian tokoh agama, namun tidak terhadap agama sebagai sistem nilai. Krisis ini muncul bukan karena masyarakat menolak ajaran agama, tetapi karena mereka tidak menerima perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai agama. Oleh sebab itu, masalah ini lebih tepat dipahami sebagai krisis representasi moral, bukan krisis agama. Dengan kata lain, masyarakat tetap menghormati nilai Islam, tetapi mengkritisi individu yang dianggap gagal mempraktikkan nilai tersebut (Harahap et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan dinamika ini, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun kembali standar etika publik bagi tokoh agama di era digital. Masyarakat mengharapkan seorang gus tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga kemampuan mengelola citra moral, etika komunikasi, dan sensitivitas sosial. Kasus-kasus kontroversial ini memberikan pelajaran bahwa otoritas keagamaan harus bersifat akuntabel, adaptif, dan transparan, sehingga legitimasi moral dapat kembali terjaga di tengah perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, analisis sosial-agama terhadap dinamika kontroversi gus-gus di Pulau Jawa menjadi kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi etika keagamaan dalam ruang publik modern.

KESIMPULAN

Analisis terhadap dinamika kontroversi tokoh gus-gus di Pulau Jawa menunjukkan bahwa etika dan moralitas figur agama kini berada dalam sorotan publik yang jauh lebih ketat dibanding era sebelumnya. Status keagamaan dan legitimasi genealogis tidak lagi otomatis menjamin penerimaan sosial, karena masyarakat modern menilai pemuka agama melalui konsistensi perilaku, sensitivitas sosial, dan adab komunikasi di ruang publik maupun digital. Kasus-kasus seperti tindakan Gus Elham yang dinilai melanggar etika perlindungan anak, konten Gus Samsudin yang dianggap menormalisasi perilaku tidak senonoh dalam dakwah, serta ujaran kasar Gus Miftah yang memantik kritik mengenai adab seorang ulama, semuanya memperlihatkan bahwa ekspektasi moral terhadap tokoh agama mengalami pergeseran menuju standar akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Fenomena ini menegaskan bahwa krisis yang muncul bukanlah krisis agama, melainkan krisis representasi moral sebagian figur religius. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya rekonstruksi etika publik bagi tokoh agama melalui pendidikan akhlak yang lebih intensif di pesantren, penguatan literasi digital bagi para da'i, serta pembentukan kode etik dakwah yang relevan dengan tantangan era media sosial. Selain itu, lembaga keagamaan perlu memperkuat mekanisme evaluasi internal untuk memastikan bahwa pewaris otoritas religius benar-benar mencerminkan nilai Islam secara komprehensif. Masyarakat pun perlu didorong untuk lebih selektif dalam memilih figur agama yang dijadikan rujukan, dengan mengutamakan rekam jejak moral, integritas, dan kapasitas komunikasi etis. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan dapat tetap terjaga dan berfungsi konstruktif dalam kehidupan sosial-keagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, E. I. (2025). Routinizing Charisma: The Rise of Gus and The Transformation of Pesantren in Jepara, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 401–428.
- Ardona, T. F., & Nasar, I. (2025). Narasi Hadis di Media Sosial: Adab Komunikasi dalam Dakwah Gus Miftah dan Pembentukan Otoritas Keagamaan. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 3(1), 217–230.
- Effendi, D. I., & Ridwan, A. (2022). *Dakwah dan Media Massa: Perspektif Sosiologi dan Budaya Populer* (2 ed.). Yayasan Lidzikri.
- Enjang, & Supandi, D. (2025). Dampak Media Sosial terhadap Identitas Keagamaan Muslim Pada Abad Ke-21 Perspektif Sosial dan Budaya. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(1), 1600–1610.
- Fakhruddin, M. (2025). *Kasus Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menteri PPPA Minta Masyarakat Waspada* Praktik Child Grooming. MUI Digital. <https://mui.or.id/baca/berita/kasus-gus-elham-cium-anak-perempuan-menteri-pppa-minta-masyarakat-waspada-praktik-child-grooming>
- Fitriani, M. I. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan (Teori dan Aplikasinya dalam Pengembangan "Basis Religius" Madrasah)*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Governance, J., Uma, P. S., Fadiyah, I., & Fauzi, A. M. (2025). *Religion-Based Leadership and Shifting Public Perceptions : The Case of Gus Muhdlor in Sidoarjo*. 13(2), 229–237. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v13i2.15467>
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Keperpustakaan (Library Research)*. Rajawali Press.
- Harahap, S. M., Siregar, F. A., & Harahap, D. (2021). *Nilai-nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Merdeka Kreasi.

- Hatmini, S. S., & Nugroho, A. Y. (2025). Kontestasi Budaya dan Respons Negara terhadap Penerimaan LGBT: Perbandingan Antara Indonesia dan Model Inklusivitas di Eropa. *Journal of Political Issues*, 6(2), 146–155.
- Hazan, Ramadhani, R., & Mutmainnah. (2025). Konsep Dasar Etika. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi* |, 4(2), 55–62.
- Hesya, A. F. (2025). *Cara Mendidik Anak Masa Kini*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Imbaruddin, A. (2016). *Birokrasi, Akuntabilitas dan Kinerja*. De La Macca.
- Kasir, I., & Awali, S. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarluaskan Pesan Islam di Era Modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68.
- Kuswana, D., & Pauzian, M. H. (2023). Religious Authority in the New Media Era: Sabilul Huda Islamic Boarding School Da'wah on Social Media. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 17(2), 415–444.
- Laili, N. H., & Fauzi, A. (2024). Upaya Melestarikan Tradisi Keagamaan Aswaja: Studi Kasus Pondok Pesantren al-Falah Sumber Gayam Pamekasan. *Jurnal Studi Pendidikan*, 5(2), 88–102.
- Lubis, Y. M., & Kadri, W. N. (2024). Ujaran Kebencian di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran dan Solusinya). *BUSYRO: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 1–17.
- Mufrida, I., & Pratiwi, C. S. (2025). Analisis Dampak Dakwah Gus Iqdam terhadap Dinamika Sosial dan Keagamaan: Studi Kasus pada Masyarakat Karanggayam Blitar. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3), 302–319.
- Purwanti, F. (2024). *Gus Samsudin Dituntut 2,5 Tahun Penjara di Kasus Konten Tukar Pasangan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7430646/gus-samsudin-dituntut-2-5-tahun-penjara-di-kasus-konten-tukar-pasangan>
- Rafidawati, M., & Nurjanah, T. (2025). Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 43–57.
- Renaldi, M. H. (2025). Negosiasi Otoritas Keagamaan dan Dinamika Ruang Publik Islam. *Jurnal Pemikiran IMM*, 1(1), 1–17.
- Riawan, D. K. (2023). Pembentukan Akhlak Moral Santri di Pondok Pesantren sebagai Tujuan Utama Pendidikan dengan Kurikulum Berbasis Agama. *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2023*, 653–661.
- Rizky, F. I., Faridah, N., Sholichah, A., Naya, A., & Siswanto, A. H. (2025). Transformasi Metodologi Dakwah dalam Era Teknologi Informasi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 624–629.
- Sahal, U. (2024). *Viral Gus Miftah Sebut Penjual Es Goblok, Dosen UM Surabaya Ingatkan Soal Adab Publik Figur*. UM Surabaya. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/viral-gus-miftah-sebut-penjual-es-goblok-dosen-um-surabaya-ingatkan-soal-adab-publik-figur>
- Sartono, Fahmi, A. Z., & Ahyani, H. (2025). *Islamic Mindset 6.0: Meracik Islam Kontekstual dalam Pendidikan, Karakter, dan Etika di Dunia Modern*. Widina Media Utama.
- Siregar, M. N., & Madya, E. B. (2025). Strategic Roles of Religious Leaders in Shaping Islamic Youth Morality. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(4), 1–13.
- Taufiqurrahman, T., Nugroho, N., & Firdaus, A. (2025). Dampak Gelar Keagamaan terhadap Otoritas Sosial: Studi Kritis terhadap Gus Miftah di Media Sosial Tiktok dalam Perspektif Budaya dan Agama. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 64–81.
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam

- Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.
- Yusutria. (2023). *Manajemen Pendidikan Berbasis Pesantren/Asrama*. Jivaloka.